

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU –BUKU

- Andi Hamzah, 2010. *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta
- Beni Ahmad Saebani, 2009. *Metode Penelitian Hukum*, CV. Pustaka Setia, Bandung
- Burhan Ashshofa, 2013. *Metode Penelitian Hukum*, PT.Rineka Cipta, Jakarta
- Moenta Andi Pangeran, DKK, 2018. *Pokok-pokok Hukum Pemerintahan Daerah*. Depok:PT RajaGrafindo Persada.
- Suharizal DKK, 2017, *Hukum Pemerintah Daerah Setelah Perubahan UUD 1945*. Yogyakarta: Thafa Media.
- SoerjonoSoekantodan Sri Mamudji, 2000,*PenelitianHukumNormatif :SuatuTinjauanSingkat*, PT. RajaGrafindoPersada, Jakarta.

### B. Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republi Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan, Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 82.
- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja, Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 9
- Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2017 tentang Keamanan Ketertiban Umum

### C. Sumber Lain

- Abdul Rauf Alauddiun Said, *Pembagian Kewenangan Pemerintahan Pusat-Pemerintahan Daerah dalam Otonomi Daerah Seluas-luasnya menurut UUD 1945*, Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum Volume 9 No. 4, Oktober-Desember.

[Http://.Media.teliti. Com.](http://.Media.teliti.Com)

Firdaus, *Eksistensi Penyidikan Pegawai Negeri Sipil PPNS dalam Struktur Pemerintah Daerah*. Jurnal dalam [www.dinamikahukum.fh.unsoed.ac.id](http://www.dinamikahukum.fh.unsoed.ac.id).

Moh Iskandar Mardani. *Pelimpahan Kewenangan Bupati dalam Otonomi Daerah* Tinjauan Singkat, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2001